



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Gedung PLUT Jl. H. Muhammad Siantan, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Pos-el : disperindagkop@anambaskab.go.id

Tarempa, 24 Juli 2024

Kepada
Yth Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di-

Tarempa

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/000.7.2.4/ 151 /DKUMPP/SPNG/07/2024

NO	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	1(satu) Dokumen	

Diterima tanggal

Penerima,

Nama Jabatan :

.....

Nomor telepon :

Pengirim,

a.n Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas,

Indah Srie Purwatiningsih, SP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197109172003122007



**DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillah* dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas telah tersusun berbagai tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan kegiatan. Rancangan akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini sekiranya dapat dipakai sebagai panduan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dengan harapan agar pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang lebih terarah dan terukur.

Rencana kerja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Rencana Kerja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memperhatikan pada berbagai macam kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tentu saja dalam penyusunan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini memiliki kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan saran, masukan bahkan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan dokumen rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dikemudian hari. Dengan adanya dokumen rancangan Rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 23 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



Dr. MASYKUR, S.T, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19781101 200312 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas	38
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..	48
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	59
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	59
BAB V PENUTUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas	12
Tabel 3.1.Tujuan,Sasaran, dan Strategi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	50
Tabel 3.2.Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	53
Tabel 4.1.Rancangan Rencana Renja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja sendiri merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap PD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan rancangan akhir Renja Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 akan dijadikan sebagai dasar pertama dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Periode 2021-2026. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2024 serta bersinergi dengan

prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan rancangan akhir RENJA Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 – 2043;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan akhir RENJA ini adalah memberikan gambaran awal mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rancangan akhir RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan akhir RENJA Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023

Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan akhir RENJA Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ketiga dalam dokumen RENJA ini akan dikemukakan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja dari rencana kerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing sub kegiatan, permasalahan dan solusi yang diberikan. Berdasarkan Tabel 2.1 Pelaksanaan Renja Tahun 2023 memiliki realisasi keuangan sebesar **75,56%** dan realisasi fisik sebesar **98,96%**. Realisasi keuangan DKUMPP sebesar **Rp9.886.474.797,-** dengan total anggaran **Rp13.083.710.298,-**. Evaluasi pelaksanaan Renja DKUMPP selengkapnya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKUMPP Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Kendala	Solusi
	Rp.	Rp.	%	%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.939.637.172,00	1.611.236.124,00	83,07	100,00		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	74.679.272,00	40.679.047,00	54,47	100,00		
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	74.679.272,00	40.679.047,00	54,47	100,00		
Pelayanan Antar Kerja (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	74.679.272,00	40.679.047,00	54,47	100,00		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.864.957.900,00	1.570.557.077,00	84,21	100,00		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.597.051.600,00	1.389.549.814,00	87,01	100,00		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,	1.597.051.600,00	1.389.549.814,00	87,01	100,00		

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	267.906.300,00	181.007.263,00	67,56	100,00		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	267.906.300,00	181.007.263,00	67,56	100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.773.397.666,00	7.962.203.226,00	73,91	95,83		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.445.953.979,00	7.712.837.034,00	73,84	83,33		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.439.721,00	201.433.541,00	90,97	100,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	30.123.735,00	30.123.310,00	100,00	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	29.135.280,00	29.114.740,00	99,93	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	30.459.510,00	30.439.850,00	99,94	100,00		

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	26.935.260,00	26.811.160,00	99,54	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	26.933.040,00	26.803.710,00	99,52	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	41.449.225,00	24.308.900,00	58,65	100,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	36.403.671,00	33.831.871,00	92,94	100,00		

PERINDUSTRIAN)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.596.286.610,00	4.697.724.895,00	71,22	100,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	6.332.743.970,00	4.506.336.230,00	71,16	100,00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	237.320.000,00	165.240.000,00	69,63	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	26.222.640,00	26.148.665,00	99,72	100,00		
Administrasi Umum	795.479.206,00	770.073.724,00	96,81	100,00		

Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	59.456.040,00	41.421.490,00	69,67	100,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	34.613.463,00	30.982.893,00	89,51	100,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	71.520.408,00	71.381.099,00	99,81	100,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	77.093.940,00	77.032.064,00	99,92	100,00		

Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	119.525.355,00	116.489.502,00	97,46	100,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	433.270.000,00	432.766.676,00	99,88	100,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.053.728,00	0	0	0		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	442.053.728,00	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.764.169,00	1.841.221.644,00	88,15	100,00		

Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	397.243.137,00	396.493.567,00	99,81	100,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	115.110.000,00	81.739.899,00	71,01	100,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	1.576.411.032,00	1.362.988.178,00	86,46	100,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.930.545,00	202.383.230,00	67,03	100,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	159.573.045,00	114.721.830,00	71,89	100,00		

Dinas Jabatan (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	82.251.000,00	81.493.400,00	99,08	100,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	60.106.500,00	6.168.000,00	10,26	100,00		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00		

dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	- Anggaran APBD yang disediakan pada Kegiatan ini mengalami perubahan sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal - Pendampingan pemeriksaan dan pengawasan koperasi tidak dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan pengawasan secara langsung karena terbatas anggaran	- Dilakukan pendampingan pada koperasi aktif melalui sistem aplikasi - Dukungan penganggaran dalam pengurusan pembubaran koperasi sampai ke kementerian sehingga koperasi yang tidak berjalan tersebut tidak dilaporkan lagi dalam keragaan koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	204.021.522,00	200.620.806,00	98,33	100,00		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	204.021.522,00	200.620.806,00	98,33	100,00		

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
---	--	--	--	--	--	--

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	204.021.522,00	200.620.806,00	98,33	100,00	a. Masih minimnya/terbatasnya penyertaan dana yang disertakan/dianggarankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk disalurkan ke masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha. b. Minimnya informasi yang didapat masyarakat mengenai dana bergulir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. c. Kesan negatif terhadap dana bergulir masih melekat dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan belum selesainya pengembalian dana bergulir Kabupaten Natuna Tahun 2007. d. Waktu terlalu lama dalam proses pengajuan proposal	a. Tenaga Pendamping Dana Bergulir, Tim Penilai dan Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu menyikapi, membuat formulasi yang tepat, akurat dan cepat, mensosialisasikan kegiatan/program penyaluran dana bergulir dan mensiasati dengan melakukan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan kaedah yang dibuat dan diberlakukan dalam melakukan penyaluran pinjaman dana bergulir terhadap calon peminjam/mitra binaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pinjaman dan pemanfaatan dana bergulir, agar penyaluran dan pengembalian dana bergulir bisa berjalan sesuai dengan koridor dan tujuannya, lancar/tidak ada nasabah dana bergulir yang macet/nasabah dana bergulir yang memiliki kredit macet (kecil/sedikit) dibawah persentase kredit macet yang
--	----------------	----------------	-------	--------	--	---

					<p>pinjaman dana bergulir jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke Bank sehingga masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman ke Bank di bandingkan ke UPT Pengelolaan Dana Bergulir.</p> <p>e. Kurang terbukanya calon peminjam/mitra binaan dalam mengisi formulir proposal dan menjawab dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penilai disaat survey lapangan dilakukan.</p> <p>f. Banyaknya pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman tidak memiliki anggunan/jaminan atau ada anggunan/jaminan tapi belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir</p>	<p>telah ditetapkan serta tepat guna tepat sasaran.</p> <p>b. Perlunya diberikan penjelasan kepada calon peminjam/mitra binaan bahwa kegiatan ini untuk kepentingan dan kemajuan usaha masyarakat/pelaku usaha, jadi penyaluran dan pengembalian dana bergulir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Salah satu bentuk pemahaman dan sosialisasi yang harus dilakukan oleh Tenaga Pendamping Dana Bergulir di Lapangan (terutama diwilayah kerja masing-masing) adalah bahwa pinjaman dana bergulir ini, besar pengaruh dan manfaat jika dana bergulir digunakan untuk kegiatan usaha/ekonomi produktif, untuk kemajuan usaha yang dijalankan/dimilki masyarakat/pelaku usah, jika penggunaan dana bergulir digunakan sepenuhnya untuk kepentingan usaha yang dijalankan/dimilki dan bukan digunakan untuk</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dan pengurusan BPHTB Sertifikat.</p> <p>g. Pelaku usaha yang mengajukan pinjaman banyak tidak mencatat transaksi usahanya.</p> <p>h. Faktor geografis dan minimnya sarana telekomunikasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha maupun Tim Penilai dan Tenaga Pendamping dalam menjangkau masing-masing calon mitra binaan yang mengajukan pinjaman dana bergulir mensosialisasikan pinjaman dana bergulir.</p> <p>i. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan dan di desa, hingga banyak para pelaku usaha tidak tau keberadaan dan manfaat kantor UPT Pengelolaan</p>	<p>kepentingan/pemanfaatan diluar usaha yang dijalankan/dimiliki (untuk perilaku konsumtif) sehingga tidak menunggak/pengembalian pinjaman dana bergulir tepat waktu.</p> <p>d. Tenaga Pendamping Dana Bergulir harus menjelaskan kepada masyarakat/pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir tentang syarat dan criteria, aturan yang ditetapkan/ketentuan yang berlaku dan mengingatkan kepada nasabah dana bergulir/mitra binaan agar mengembalikan pinjaman atau angsuran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian disaat akad kredit/tepat waktu.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					Dana Bergulir j. Kurang giatnya tenaga pendamping dana bergulir dalam mensosialisasikan program dana bergulir	
--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	103.422.165,00	48.745.386,00	47,13	100,00		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	103.422.165,00	48.745.386,00	47,13	100,00		
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	103.422.165,00	48.745.386,00	47,13	100,00	- Pendampingan dan pembinaan pelaku usaha mikro tidak dapat dilakukan melalui pendampingan langsung ke 10 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kepulauan anambas, tetapi dilakukan secara online. - Target untuk membantu produk usaha mikro untuk memfasilitasi halal secara gratis tidak dilakukan maksimal karena lokasi	- Belum maksimalnya pengurusan perizinan usaha (NIB) - agar dapat difasilitasi sertifikat PIRT dengan pelatihan PKP sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan sertifikat produk halal - harus didukung dengan anggaran turun lapangan untuk mencapai sertifikat produk halal ke pelaku usaha di bidang makanan olahan - penganggaran untuk fasilitasi Informasi Nilai Gizi (ING) dan BPOM untuk pemasaran produk keluar Anambas

					daerah kepulauan dan sinyal yang belum mendukung, dan mengkhususkan agar persyaratan yang diminta harus diupload secara online.	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	319.098.460,00	274.755.106,00	86,10	100,00		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	99.646.660,00	72.902.706,00	73,16	100,00		
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	99.646.660,00	72.902.706,00	73,16	100,00		

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	99.646.660,00	72.902.706,00	73,16	100,00	1. Calon Pedagang yang berminat menyewa kios atau los pada pasar yang di kelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas tidak langsung datang ke kantor maupun pengelola pasar namun langsung ke pedagang yang sebelumnya sehingga informassi yang didapat calon pedagang tidak valid; 2. Terdapatnya monopoli kepemilikan kios dan meja yang ada di pasar milik Pemerintah;3. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penarikan Retribusi;4. Anggaran untuk Pemeliharaan Pasar tidak ada sehingga adanya protes dari pedagang atas kerusakan pada fasilitas	1. Pengelola pasar harus berperan aktif dalam memberikan informasi bagi calon pedagang yang berminat menyewa kios atau los agar informasi yang disampaikan kepada calon pedangang adalah informasi yang valid;2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian khususnya Bidang Perdagangan melakukan pendataan dengan teliti serta melakukan pengawasan terhadap pedagang dan segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di pasar-pasar;3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penarikan Retribusi;4. Membuat surat izin baru bagi pengguna kios maupun meja sesuai aturan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2016, sehingga pengguna memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam melakukan perdagangan di pasar;5. Melakukan rapat secara rutin dengan pengelola pasar agar dapat memecahkan permasalahan dipasar dan pengelola
--	---------------	---------------	-------	--------	---	--

					<p>pasar;5. Rendahnya besaran retribusi yang ditetapkan Pemerintah sehingga yang disetorkan ke kas daerah juga rendah berdasarkan setoran dari pedagang;6. Banyaknya pemilik atau pengguna kios atau meja yang tidak buka;7. Terdapatnya fasilitas pasar yang rusak seperti pintu kios, pintu wc, pagar pasar maupun pelafon sehingga mengurangi minat pedagang dalam mengisi kios dan kurang nyamannya pembeli dalam melakukan aktifitas jual beli di bangunan tersebut;8. Lambannya proses pengajuan berkas perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) oleh pedagang;9. Kurangnya minat pembeli</p>	<p>melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing;6. Pengelola pasar secara rutin mendata pedagang yang sudah tidak berjualan atau yang telah mengembalikan SIPTU dan melaporkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian untuk perbaruan data pada dinas;7. Diharapkan kepada Pemerintah dapat menaikkan besaran anggaran pada kegiatan ini agar kedepan dapat digunakan dalam memperbaiki fasilitas pasar seperti pintu kios, pintu wc, pagar dan plafon yang banyak rusak.</p>
--	--	--	--	--	---	---

						untuk melakukan transaksi di beberapa pasar seperti pasar baru lantai 2(dua) dikarekan kurangnya minat pembeli untuk mengunjungi lantai 2	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	151.820.400,00	137.875.000,00	90,81	100,00			
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	151.820.400,00	137.875.000,00	90,81	100,00			

dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	80.000.000,00	69.558.600,00	86,95	100,00	<p>a. Minimnya Anggaran dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu dan Penugasan dalam hal penambahan pendistribusian kuota dan terkhusus pada perizinan eceran BBM yang menjadi delema di tengah-tengah masyarakat.</p> <p>b. Kurangnya koordinasi dan senergilitas Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi berwenang tentang kebijakan baik terkait perizinan, surat rekomendasi pemanfaatan dan pengawasan BBM, khususnya jenis solar.</p> <p>c. Kurangnya melakukan</p>	<p>a. Dengan anggaran yang sangat memadai sesuai usulan rencana detail kegiatan, maka pembinaan dan pengawasan terkait Bapoting dan khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terkendali sesuai menjawab kebutuhan pengguna konsumen bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.</p> <p>b. dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait regulasi khususnya BBM, tentang usulan penambahan kouta dan system pendistribusian di daerah khususnya di desa dan pelaku usaha.</p> <p>c. dapat mealkukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam upaya menjaga stabilitas harga dan stabilitas stok kebutuhan bapoting di tengah – tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum.</p>

					kordinasi di tingkat Pusat khususnya pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan Pertamina Kepri terkait penambahan Kouta dan sistem pendistribusian Kouta ke Kabupaten Kepulauan Anambas.	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	71.820.400,00	68.316.400,00	95,12	100,00		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	67.631.400,00	63.977.400,00	94,60	100,00		

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	67.631.400,00	63.977.400,00	94,60	100,00		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	67.631.400,00	63.977.400,00	94,60	100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	51.577.000,00	38.280.341,00	74,22	100,00		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	51.577.000,00	38.280.341,00	74,22	100,00		
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	51.577.000,00	38.280.341,00	74,22	100,00		

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)	51.577.000,00	38.280.341,00	74,22	100,00		
Jumlah	13.083.710.298,00	9.886.474.797,00	75,56	98,96		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan lembaga teknis yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, serta dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan penggalan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia secara optimal. Apalagi Kepulauan Anambas secara geografis memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga keterhubungan antara program yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak adanya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas pada dasarnya memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Pasal 7 ayat (2)) serta urusan pilihan Perindustrian dan urusan pilihan Perdagangan (Pasal 7 ayat (4)) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 34 orang Pegawai Negeri Sipil, 39 orang Pegawai Tidak Tetap dan 18 orang tenaga honorer. Sumber daya yang ada pada Perangkat Daerah ini dapat dievaluasi tingkat efektivitas dan efisiensinya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan, sehingga pengukuran ini akan terlihat hasilnya pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah serta kondisi kekinian termasuk berbagai kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing bidang, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal di lingkup Perangkat Daerah dalam rangka penentuan isu strategis. Permasalahan dimaksud meliputi:

1. Permasalahan Internal

- a. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang, sehingga pembinaan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, maupun Pasar belum maksimal;
- b. Masih banyaknya jabatan struktural yang belum terisi, sehingga proses pelayanan masih terkendala;
- c. Lemahnya daya kontrol pemerintah di sektor perdagangan, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme pasar yang akan memperlambat perkembangan UKM;
- d. Rendahnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar tradisional);
- e. Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, murah dan mudah terjangkau;
- f. Belum adanya gudang sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan barang esensial lainnya;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah oleh aktivitas industri;
- h. Masih lemahnya peran industri kecil dan rumah tangga sehingga belum bisa dijadikan andalan bagi perekonomian daerah;

- i. Belum tersedianya sarana kemetrolgian dalam rangka melindungi produsen dan konsumen;
 - j. Kualitas SDM pelaku usaha masih rendah terutama dalam hal manajemen, permodalan, kewirausahaan dan akses pasar;
 - k. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta rendahnya kepastian keuangan daerah, sedangkan tanggungjawab semakin besar;
 - l. Belum optimalnya penggunaan potensi daerah dalam kegiatan industri;
 - m. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemeliharaan daya hubung;
 - n. Penggalan, pengolahan dan pemasaran komoditi agroindustri dan industri kelautan belum optimal;
 - o. Pengelolaan IKM masih bersifat tradisional sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki daya saing di pasar;
 - p. Kegiatan promosi produk masih kurang, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal;
 - q. Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki, sehingga skala usaha mereka sulit ditingkatkan;
 - r. Aktulitas dan akurasi data di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan;
 - s. Belum meratanya pertumbuhan dan perkembangan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - t. Belum adanya pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Permasalahan Eksternal
- a. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau dan pada waktu-waktu tertentu iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif, dimana laut tidak dapat dilayari oleh kapal yang bertonase kecil;

- b. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;
- c. Adanya kelangkaan *stock* dan barang esensial lainnya pada musim tertentu dengan harga yang relatif tinggi;
- d. Regulasi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selalu berubah-ubah;
- e. Penyebaran penduduk yang belum merata dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah;
- f. Penjarahan sumber daya alam oleh pihak asing sehingga merugikan daerah secara umum;
- g. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- h. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan instansi lain;
- i. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- j. Membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan kualitas dan harga barang yang kompetitif akan menghancurkan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan UKM yang saat ini justru menjadi andalan pemulihan ekonomi;
- k. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat.

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan pelayanan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Peluang dimaksud meliputi :

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;

2. Dibukanya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (*Special Economic Zone*);
3. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan meningkatkan sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kepulauan Anambas;
4. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
5. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
7. Tekat pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
8. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
9. Potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;
10. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat;
11. Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dapat memperluas usahanya di sektor perdagangan, industri, aneka jasa, nelayan dengan melibatkan organisasi kewanitaan, pemuda, lembaga pendidikan, pertanian dan non pertanian, dan penyatuan beberapa Koperasi Primer menjadi Koperasi Sekunder guna memperkuat jaringan usaha;
12. Peningkatan skala usaha dari bersifat mikro menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan penumbuhan UKM baru;
13. Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Kepulauan Anambas;

14. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik antara daerah, provinsi dan nasional;
15. Diwujudkan komitmen penyediaan dana bergulir, hibah, dan stimulus dari APBD Provinsi dan APBN;
16. Menyediakan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel diakses oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM);
17. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan UKM;
18. Pemberian beasiswa bagi pengelola dan kader Koperasi terutama yang tergabung dalam IKOPIN dan atau Perguruan Tinggi yang mengembangkan pendidikan perkoperasian;
19. Memberikan kesempatan magang bagi aparatur dan pengurus Koperasi ke Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (RPMJMD 2021-2026). Adapun isu-isu strategis daerah dimaksud berkenaan dengan tugas dan fungsi DKUMPP :

1. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Wilayah Tematik

Guna menciptakan suatu ekosistem yang sesuai dan saling mendukung antar pelaku usaha, perlu adanya pembangunan kawasan khusus untuk pengembangan industri unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk dapat menarik pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memberi dukungan kepada Kawasan Industri dengan memberikan insentif tertentu. Pengembangan industri dapat difokuskan pada potensi unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas seperti industri pertambangan di pulau Matak,

pariwisata di pulau Jemaja, Siantan Timur dan pulau matak. Pengembangan industri perikanan budidaya di pulau Matak dan pulau Bajau, untuk industri pertanian di pulau Jemaja dan pulau Matak. Adanya Kawasan Industri di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan insentif yang diberikan dapat menjadi sinyal positif bagi investor di luar Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kejelasan peta pembangunan industri sehingga berpotensi menarik investasi masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Anambas . Selain itu, pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpecah di pulau yang berbeda dapat mengusung pembangunan tematik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Konektivitas antar wilayah harus dipertegas guna memperkuat rantai ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Konektivitas dapat ditingkatkan dengan cara pembangunan infrastruktur perhubungan, baik lewat transportasi darat maupun laut sehingga dapat menekan biaya logistik.

2. Integrasi Infrastruktur Perdagangan Dan Logistik

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan menyebabkan kesulitan akses yang berakibat pada tingginya biaya logistik dari dan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas. Tingkat kesulitan akses Kabupaten Kepulauan Anambas tergambar pada tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Kesulitan akses dan tingginya IKK menyebabkan kegiatan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas berbiaya tinggi (*high cost economy*). Pada tahun 2020, nilai IKK Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

138,78. Hal ini dapat diartikan bahwa perbandingan tingkat kemahalan barang-barang konstruksi secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih tinggi 38,78 persen dibandingkan kota acuan, yaitu Kota Semarang. Angka tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 133,26. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi daerah dengan IKK tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau setidaknya selama tahun 2019-2021. Diperlukan adanya peningkatan infrastruktur sektor perhubungan guna menurunkan biaya logistik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembangunan infrastruktur perhubungan di antaranya pembangunan pelabuhan baik peningkatan kapasitas maupun pembangunan pelabuhan baru. Pembangunan pelabuhan harus diikuti dengan penambahan trayek atau jumlah armada angkut. Selain itu, perlu adanya pemisahan antara pelabuhan barang dan orang guna optimalisasi efektivitas pelabuhan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini utamanya untuk memperkuat peran pelabuhan logistik perdagangan.

Tingginya biaya logistik akibat sulitnya akses tercermin pada tingginya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, kesulitan akses juga menyebabkan pasokan kebutuhan pokok tidak stabil yang menyebabkan adanya kekurangan bahan pokok di waktu-waktu tertentu. Stabilitas pasokan juga berdampak terhadap stabilitas harga. Untuk mengatasi ketidakstabilan dan tingginya harga di Kabupaten Kepulauan Anambas, selain peningkatan infrastruktur logistik, beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya adalah memperkuat rantai pasok, meningkatkan kualitas sistem pergudangan barang pokok, melakukan kontrol harga, serta mengintervensi adanya kekuatan monopoli.

3. Peningkatan Kewirausahaan Lokal

Rendahnya penciptaan kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Anambas berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan kerja baru. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai pekerja tidak tetap dengan upah dan kompetensi yang rendah. Guna mengatasi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan membantu mengentaskan kemiskinan daerah, perlu dikembangkan sektor kewirausahaan yang berbasis UMKM dan inovatif. Penciptaan produk wirausaha yang inovatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Kegiatan wirausaha dapat difokuskan pada penciptaan nilai tambah produk pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memulai usaha adalah akses permodalan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mendorong perluasan akses permodalan bagi kegiatan wirausaha dengan menyediakan bantuan permodalan dengan skema inovatif yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Selain dalam hal permodalan, peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sangat diperlukan dalam mengembangkan iklim kewirausahaan seperti kemudahan izin usaha, dll., pelatihan dan pembinaan, serta sebagai inkubator untuk wirausaha baru.

Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wirausaha di Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu adanya kesinambungan antara penawaran dan permintaan produk wirausaha. Jangan sampai wirausaha yang sudah berjalan tidak memiliki pangsa pasar dan menghentikan kegiatan usaha. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga diperlukan dalam proses distribusi dan promosi produk usaha baik di dalam Kabupaten Kepulauan Anambas maupun di luar Kabupaten Kepulauan Anambas. Mengingat akses distribusi yang terbatas, perlu adanya

inovasi pemerintah daerah dalam skema distribusi produk usaha untuk keluar dan masuk Kabupaten Kepulauan Anambas guna menurunkan biaya kirim.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan (a) sasaran-sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026; (b) tema, sasaran pokok, dan bidang-bidang pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dan (c) hasil identifikasi isu-isu strategis daerah. Ketiga hal tersebut dipadukan sehingga RKPD Tahun 2025 dapat sinkron dengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Pada reviu ini dilakukan dengan perbandingan antara kebutuhan sesuai Renstra Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 2021-2026 yang dianggap mewakili dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terhadap perkiraan ketersediaan anggaran riil tahun 2025 (Rancangan akhir Renja) matriks Bab IV, penyusunan ini bersifat indikatif dan dapat menyesuaikan kembali dikarenakan besaran anggaran sangat terbatas. Adapun dokumen Renstra dapat dilihat pada link berikut <https://tinyurl.com/RENSTRADKUMPP2021-2026>

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan akhir Renja DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 akan didiskusikan pada pelaksanaan forum PD/lintas PD. Pembahasan pada diskusi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan akhir Renja DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan. Pada kesempatan ini, dikarenakan proses perencanaan belum memasuki tahapan sebagaimana dimaksud, maka penelaahan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan kepada DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat dilakukan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Ranwal Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dikemukakan sebelumnya, sejatinya visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur sebagaimana terlihat pada Tabel 6. Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Adapun Rancangan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada RKPD 2025 yaitu **“Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”** yang terdiri dari rancangan prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu “**Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah (BERMADAH 2)**”. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan tujuh misi. Dari ketujuh misi tersebut, ada enam poin yang menjadi sasaran pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	10%	25%	43,33%	63,33%	83,33%	100%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5%	10%	15%	20%	25%	30%
		Tingkat stabilitas harga barang	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC/56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Nilai IKM Perangkat Daerah	A/94,78	B/94,79	B/94,8	B/94,81	B/94,82	B/94,83

Sumber: Renstra 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih menitikberatkan pada pengendalian harga serta ketercukupan stok bahan pokok dan barang esensial lainnya, mengingat daerah ini merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan dalam hal transportasi. Sehingga pada musim-musim tertentu persoalan kelangkaan stok dan harga yang tinggi masih menjadi isu utama. Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
4. Pengentasan Kemiskinan;
5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
6. Pengendalian Inflasi;
7. Pengembangan Daerah Terisolir;
8. Konektivitas wilayah;
9. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Kabupaten Kota Sehat (KKS);
10. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA);
11. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
12. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencegahan *Stunting*;
13. Inovasi Daerah;
14. Blue Economy.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Koperasi, Usaha Mikro , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran. Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan DKUMPP tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Pengadaan Alat Besar
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Pengadaan Aset Tak Berwujud
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan sidang Tera dan Tera Ulang terhadap alat UTPP
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	Pameran Dagang Lokal
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Program Hubungan Industrial	Pengesahan dan Peraturan Pesuahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan dan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
	Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan

	Kabupaten/Kota	Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan daerah.
		Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta nonafiliasi.
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Tranmigrasi

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Di dalam rancangan RENJA, plafon anggaran Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ditujukan untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat prioritas dan penting. Walaupun masing-masing perangkat daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan tambahan dan kegiatan tersebut akan diakomodir bila kondisi keuangan daerah mencukupi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2025 dengan pagu **belanja** indikatif sebesar **Rp.13.051.702.128** dan pagu **pengeluaran pembiayaan** berupa dana bergulir kepada masyarakat sebesar **Rp. 2.000.000.000.** pada

rancangan akhir Renja ini juga telah memasukan kegiatan pada UPT Metrologi legal dan UPT Dana Bergulir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih menitikberatkan pada pengembangan usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah serta meningkatnya ketersediaan logistik daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Perlunya mensejahterakan pelaku-pelaku usaha maupun koperasi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rancangan akhir Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengusulkan keseluruhan belanja Sub Kegiatan dengan pagu **RP. 13.051.702.128**, dan pengeluaran pembiayaan **RP.2.000.000.000**, Pagu tersebut termasuk usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 yang telah diverifikasi akhir oleh TAPD Perencana Daerah. Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						12.887.339.061,00						20.254.983.416,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.974.239.061,00							16.407.628.083,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.778.550.000,00							3.979.660.413,00	
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	<i>Presentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang direncanakan setiap tahun</i>	-			1 Dokumen	1.100.000,00						-	142.222.241,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Tersusunnya rencana tenaga kerja Makro</i>	-			1 Dokumen	1.100.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Peningkata n pemanfaa tan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Perusahaan	-	142.222.241,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Perusahaan		142.222.241,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun</i>	-			20 %	1.400.000,00						-	50.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi</i>	-			50 Orang	1.400.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pencari Kerja	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat yang Sedang Mencari Kerja		310.438.172,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola</i>	-			1 laporan	1.700.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat yang Sedang Mencari Kerja	-	295.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat yang Sedang Mencari Kerja		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				1 Orang	500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat yang Sedang Mencari Kerja		145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase besaran kasus yang diselesaikan</i>	-			9 kasus	1.764.350.000,00						-	3.182.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya regulasi yang tersusun</i>	-			1 dokumen	1.102.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat	-	1.602.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>				50 Perusahaan	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat		162.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>				50 Perusahaan	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat		140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdayasaing	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha</i>	-			1 laporan	662.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat	-	1.580.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				50 Perkara	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				50 Perkara	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat		180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>				50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Masyarakat		230.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				10 Lembaga	650.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Masyarakat		670.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.195.689.061,00							12.427.967.670,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	9.714.639.061,00						-	11.052.785.809,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik</i>	-			100 %	17.550.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dokumen Perencanaan	-	67.420.780,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Dokumen Perencanaan		7.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan		14.576.630,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	410.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan		4.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan		13.467.630,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan		13.466.520,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Dokumen Perencanaan		8.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Dokumen Perencanaan		5.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	7.644.919.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur	-	4.886.658.081,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				36 Orang/bulan	7.418.719.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.627.158.081,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur		9.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi umum kantor</i>	-			100 %	290.415.446,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	-	1.500.164.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		169.456.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	49.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		169.298.257,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	21.520.408,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		171.520.408,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	37.093.940,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		177.093.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	39.531.098,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		179.525.355,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	133.270.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		633.270.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan BMD</i>	-			100 %	64.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	-	1.132.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		66.946.272,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		96.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		52.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		142.053.728,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		195.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	1.665.230.170,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	-	1.970.022.948,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	22.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		294.177.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	59.245.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		115.110.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.583.485.170,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		1.560.735.948,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan BMD</i>	-			100 %	31.824.045,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	-	1.496.520.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	9.573.045,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		159.573.045,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	12.251.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		82.251.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian		1.254.695.955,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<i>Persentase koperasi aktif yang memiliki izin usaha simpan pinjam</i>	-			20 usaha	850.000,00						-	274.100.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Akumulasi Koperasi Yang mendapatkan Fasilitas Perizinan dari Koperasi Aktif</i>	-			20 usaha	850.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha	-	274.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				20 Unit Usaha	850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		274.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif	-			10 persen	46.200.000,00						-	377.950.747,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP</i>	-			12 usaha	46.200.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha	-	377.950.747,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				6 Unit Usaha	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		57.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				12 Unit Usaha	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		320.950.747,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan</i>	-			2 koperasi	10.000.000,00						-	148.131.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan	-			18 usaha	10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdayasaing	koperasi	-	148.131.114,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				12 Orang	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdayasaing	koperasi		148.131.114,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	-			210 penerima DB	9.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan</i>	-			250 usaha	9.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				20 Orang	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil</i>	-			10 persen	415.000.000,00						-	425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas</i>	-			59 usaha	415.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdayasaing	usaha	-	425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				59 Unit Usaha	415.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdayasaing	usaha		425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						913.100.000,00							3.847.355.333,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						301.100.000,00							1.563.296.009,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-			-	115.000.000,00						-	135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	115.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				135 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	20.000.000,00						-	538.296.009,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	20.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	538.296.009,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				14 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		338.296.009,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				25 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase kestabilan harga barang</i>	-			0,71 %	156.100.000,00						-	740.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)</i>	-			15 Hari	116.100.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang Barang Kebutuhan Pokok	-	390.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				24 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang Barang Kebutuhan Pokok		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang Barang Kebutuhan Pokok		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				24 Laporan	1.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang Barang Kebutuhan Pokok		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepulauan Anambas</i>	-			0,71 %	40.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Komoditi	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Komoditi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				16 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Komoditi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Persentase Pelaku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal</i>	-			0 %	10.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	-			55 Pedagang	10.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				55 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	Pedagang		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						599.000.000,00							1.776.059.324,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	-			13 orang	579.000.000,00						-	1.650.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	-			88 Orang	579.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	orang	-	1.650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				13 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	orang		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	orang		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	559.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	orang		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan</i>	-			0 %	10.000.000,00						-	68.095.620,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri</i>	-			224 usaha	10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha	-	68.095.620,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				25 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		68.095.620,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri</i>	-			0 %	10.000.000,00						-	57.963.704,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Data Industri di dalam SINNAS</i>	-			1 %	10.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha	-	57.963.704,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				14 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	usaha		57.963.704,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						13.000.000,00							508.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibina</i>	-			0 %	13.000.000,00						-	508.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya PersentaseKawasan transmigrasi yang dibina</i>	-			0 %	13.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	transmigran	-	508.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	transmigran		140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran															
			<i>Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	transmigran		178.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi															
			<i>Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)</i>				10 Kepala Keluarga	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	transmigran		190.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR							104.000.000,00							201.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						104.000.000,00							201.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						104.000.000,00							201.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.000.000,00						-	51.000.000,00	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	6.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		6.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	10.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	45.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		45.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	90.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	90.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	150.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				12 Unit Usaha	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		150.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR
		UPT METROLOGI LEGAL						60.363.067,00							199.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						60.363.067,00							199.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						60.363.067,00							199.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	5.000.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		5.000.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	56.363.067,00						-	194.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	56.363.067,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-	-	194.000.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				120 Unit	46.363.067,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah	-		145.000.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	-		49.000.000,00	UPT METROLOGI LEGAL
J U M L A H								13.051.702.128,00							20.654.983.416,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian yang membidangi sektor Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi dan UKM. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RENJA ini.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang mengurus sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun alokasi

anggaran dan target yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif . Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 selain mengacu pada RENJA ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dan target indikator kegiatan kemudian akan disesuaikan ditahap finalisasi penganggaran.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga Rancangan akhir Renja OPD Tahun 2025 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : 23 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



Dr. MASYKUR, S.T, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19781101 200312 1 011